

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA JAGAKARSA**

**LAPORAN KINERJA (LAKIN)
TAHUN 2024
NOMOR LAP-7/KPP.3009/2025**



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA JAGAKARSA

PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi.

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jagakarsa Tahun 2023 ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi yang berbasis pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan penilaian kinerja secara kuantitatif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara berkelanjutan.

Dalam penyusunan laporan ini, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa senantiasa mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024, yaitu:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: ‘Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.’”

Serta didukung oleh misi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandar, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital, didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Dalam pelaksanaan tugas ini, seluruh aparat di lingkungan KPP Pratama Jakarta Jagakarsa senantiasa mengedepankan moto "*Melayani dengan HATI (Harmonis, Amanah, Tuntas, dan Integritas)*". Moto ini mencerminkan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan profesionalisme.

Kami menyadari bahwa tugas yang diemban tidaklah mudah, dan pencapaian yang diraih pada tahun 2023 ini merupakan hasil kerja keras serta dedikasi dari seluruh aparat pajak. Namun demikian, kami juga memahami bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan laporan kinerja di tahun-tahun mendatang dapat semakin baik dan berkualitas.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja KPP Pratama Jakarta Jagakarsa dalam mendukung pembangunan bangsa dan negara.

Dibuat di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Jagakarsa



Ditandatangani secara elektronik
Sabiqoh Faqih Syaghief



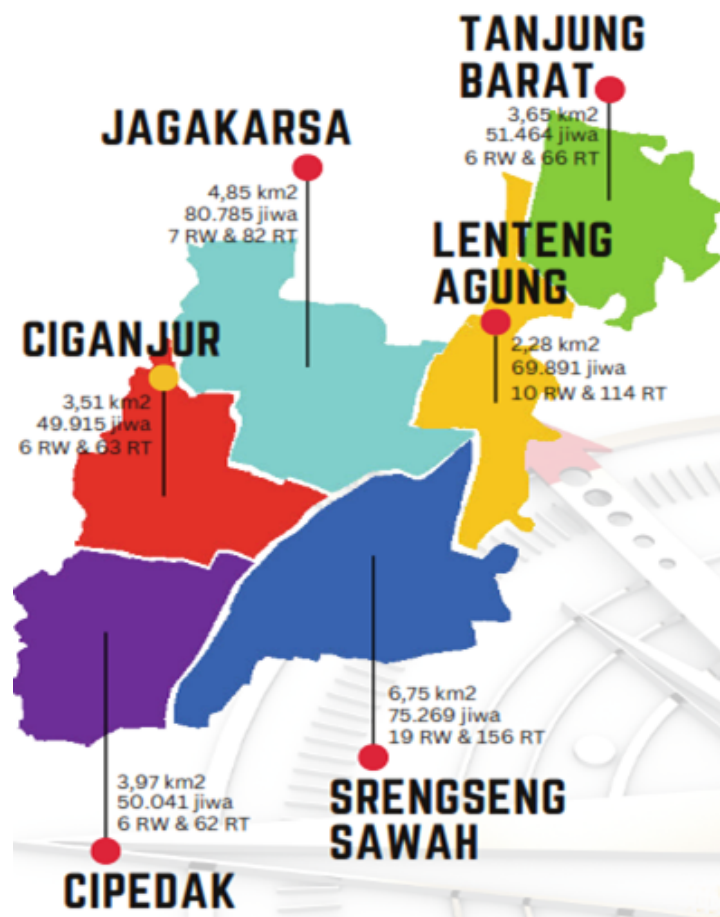
DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
Target Kinerja.....	6
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	7
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
Capaian Kinerja Organisasi.....	10
Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi.....	13
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal.....	13
2. Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi.....	15
3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi.....	18
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif.....	19
5. Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif.....	21
6. Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif.....	22
7. Penegakan hukum yang efektif.....	25
8. Data Dan Informasi Yang Berkualitas.....	29
9. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Yang Adaptif.....	30
10. Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel.....	35
BAB IV PENUTUP.....	37

BAB I PENDAHULUAN

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 yang diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2017 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2018. Kantor ini beroperasi di bawah administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa merupakan hasil pengembangan (pemecahan) dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu. Wilayah kerja yang diadministrasikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa mencakup Kecamatan Jagakarsa, yang terdiri dari enam kelurahan, yaitu Kelurahan Jagakarsa, Kelurahan Lenteng Agung, Kelurahan Ciganjur, Kelurahan Srengseng Sawah, Kelurahan Cipadak, dan Kelurahan Tanjung Barat.



Berikut adalah gambaran umum yang terdapat di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa

1. Wilayah Kerja: Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa sebagian besar didominasi oleh area perumahan dan zona hijau. Wilayah dengan aktivitas ekonomi sentral hanya terkonsentrasi di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Lenteng Agung. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk menggali potensi sumber penerimaan pajak yang optimal. Penggunaan data yang ada harus dimaksimalkan untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan. Upaya ini juga perlu diimbangi dengan penajaman strategi penegakan kewajiban pajak, serta peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak yang berada di wilayah dengan tingkat kegiatan ekonomi yang terbatas.
2. Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Pajak: Tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh dominasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berprofesi sebagai karyawan, yang mencakup sekitar 93% dari total Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa. Sebagian besar dari mereka masih tergolong awam mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang lebih intensif terkait kewajiban perpajakan, baik melalui penyuluhan langsung maupun media sosial, agar Wajib Pajak lebih memahami prosedur perpajakan dan dapat memenuhi kewajiban mereka dengan baik. Penekanan pada pentingnya pelaporan SPT dan pemanfaatan fasilitas perpajakan yang tersedia juga perlu terus digalakkan.

Saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jagakarsa berlokasi di gedung yang terletak di Jalan T. B. Simatupang No. 39, Jati Padang, Jakarta Selatan. Kantor ini menempati beberapa lantai dalam gedung yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, yaitu lantai basement, lantai satu, lantai enam, lantai tujuh, dan lantai delapan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 146/PJ/2021 mengenai Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Waktu Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki tugas untuk melaksanakan berbagai fungsi penting dalam bidang perpajakan. Tugas tersebut meliputi penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak, yang dibagi berdasarkan segmentasi administrasi, seperti Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dengan omset tertentu, yang tidak dikelola oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, Khusus, dan Madya.

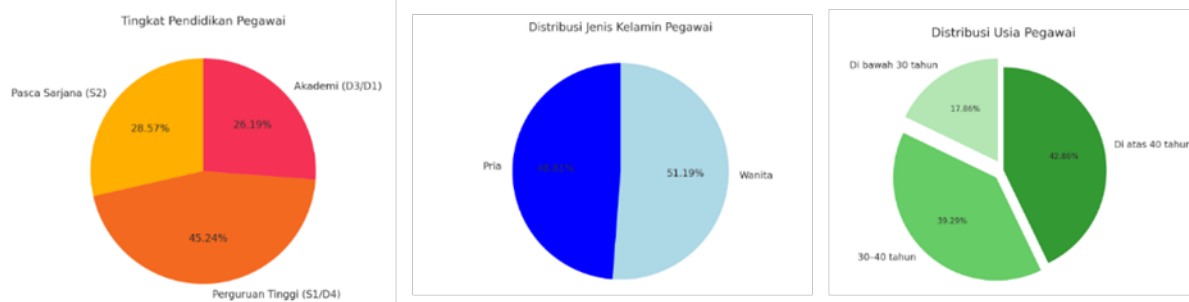
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jagakarsa bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak di wilayah kerjanya, serta melaksanakan

pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data pegawai KPP Pratama Jakarta Jagakarsa per 6 Januari 2025 terdapat 84 pegawai, dan berikut adalah statistik lengkap terkait kondisi pegawai di KPP Pratama Jakarta Jagakarsa:



1. Tingkat Pendidikan

- Pasca Sarjana (S2): 24 pegawai.
- Perguruan Tinggi (S1/D4): 38 pegawai.
- Akademi (D3/D1): 22 pegawai.

2. Jenis Kelamin

- Pria: 41 pegawai.
- Wanita: 43 pegawai.

3. Usia

- Di bawah 30 tahun: 15 pegawai.
- 30–40 tahun: 33 pegawai.
- Di atas 40 tahun: 36 pegawai.

4. Jabatan

- Kepala Kantor: 1 pegawai (1,19%).
- Kepala Subbagian/Seksi: 12 pegawai (14,29%).
- Account Representative (AR): 24 pegawai (28,57%).
- Fungsional (Pemeriksa/Penyuluh Pajak): 21 pegawai (25%).
- Pelaksana (Non-AR): 26 pegawai (30,95%).

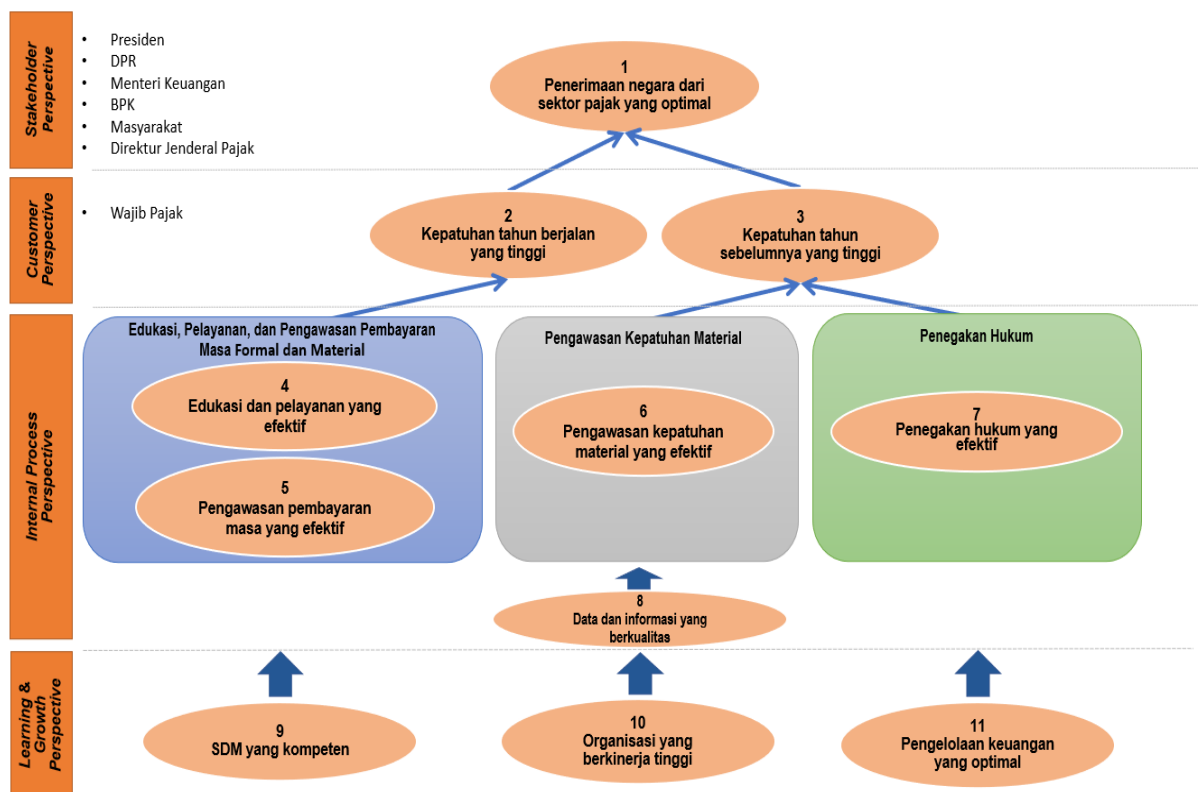
Sebagian besar pegawai KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berasal dari **Generasi X dan Milenial**, mencerminkan keseimbangan antara pengalaman dan produktivitas tenaga kerja. Generasi Z, meskipun jumlahnya relatif kecil, mengindikasikan masuknya generasi muda yang baru bergabung dan berkontribusi pada institusi. Mayoritas pegawai KPP Pratama Jakarta Jagakarsa memiliki pendidikan di tingkat **Perguruan Tinggi (S1/D4)**, mencerminkan standar kualifikasi minimal yang cukup tinggi untuk posisi di kantor pajak. Pegawai dengan pendidikan **Pasca Sarjana (S2)** menempati posisi strategis, sedangkan pendidikan **Akademi (D3/D1)** mendukung peran operasional. Hal ini menunjukkan distribusi pendidikan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan institusi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Target Kinerja

Sebagai Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa memiliki Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur kinerja organisasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah kepada *stakeholder*. Oleh karena itu, untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama diperlukan strategi yang selaras dengan visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan.”



Dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien akan mendorong budaya kinerja organisasi yang tinggi.

Dengan budaya kinerja organisasi yang tinggi maka kualitas dari pekerjaan akan menjadi prioritas utama sehingga menghasilkan data dan informasi yang valid, akurat, kredibel, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya data dan informasi yang dimiliki akan mendorong pengawasan Wajib Pajak pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya serta penegakan hukum menjadi efektif dan lebih efisien. Dengan pengawasan Wajib Pajak dan penegakan hukum yang optimal, pada akhirnya akan bermuara pada penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal juga.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pada tahun 2024, target dan pengukuran kinerja ditetapkan di dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang : Penyampaian Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Manual Indikator Kinerja, serta Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau Sasaran Kinerja Pegawai Kemenkeu-Two sampai dengan Kemenkeu-Five Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024. Target kinerja yang ditetapkan dengan Nota Dinas tersebut adalah sebagai berikut.

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama		Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Stakeholder Perspective					
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal				
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	21%	50%	72%	100%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100
Customer Perspective					
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	21%	50%	72%	100%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	90%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	75%	100%
Internal Process Perspective					
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif				
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	60%	74%
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	5%	85%

5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif				
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif				
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif				
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	45%	75%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	75%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas				
8a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	80%	100%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)	10%	25%	40%	55%
Learning & Growth Perspective					
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	70	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel				
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada intinya, penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam proses penyusunan Peta Strategi, Sasaran Strategis (SS), serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI), KPDPJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, serta masukan dari Unit Vertikal.

Keterlibatan unit-unit tersebut dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diwujudkan melalui pengiriman Nota Dinas (ND) berisi usulan IKU/IKI baru, permintaan penghapusan, maupun perbaikan IKU/IKI.

Namun, khusus untuk unit KPP Pratama Jakarta Jagakarsa, hingga saat ini tidak terdapat pengajuan ND usulan IKU/IKI baru, penghapusan, maupun perbaikan. Dengan demikian, proses penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada unit ini mengikuti panduan dan arahan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat terkait tanpa ada tambahan atau perubahan dari unit."

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Jagakarsa sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi : KPP Pratama Jagakarsa

Tahun Anggaran : 2024

No	KODE IKU	NAMA IKU	TARGET		REALISASI		GAP
			%	Angka Multak	%	Angka Mutlak	
1	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	1.359.434.951.000	100,81%	1.370.401.885.945	0,81%
				1.359.434.951.000		1.359.434.951.000	
2	1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100		110		10
3	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	1.285.062.310.000	100,79%	1.295.212.464.711	0,79%
				1.285.062.310.000		1.285.062.310.000	
3	2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	43.482	114,95%	49.984	14,95%
				43.482		43.482	
4	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	74.372.641.000	101,08%	75.177.742.433	1,08%
				74.372.641.000		74.372.641.000	
5	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%		88,80%		14,80%
6	4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%		107,96%		7,96%

7	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%		113,68%		23,68%
8	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%		120,00%		20,00%
9	6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%		119,14%		19,14%
10	6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%		114,39%		14,39%
11	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%		120,00%		20,00%
12	7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%		103,87%		28,87%
13	7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%		200,00%		100,00%
14	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%		120,00%		20,00%
15	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100		116,91		16,91
16	9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85		95,80		10,80
17	9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90		99,89		9,89
18	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100		120		20
Nilai Kinerja Organisasi					110,98	Kenaikan dari tahun lalu	3,97

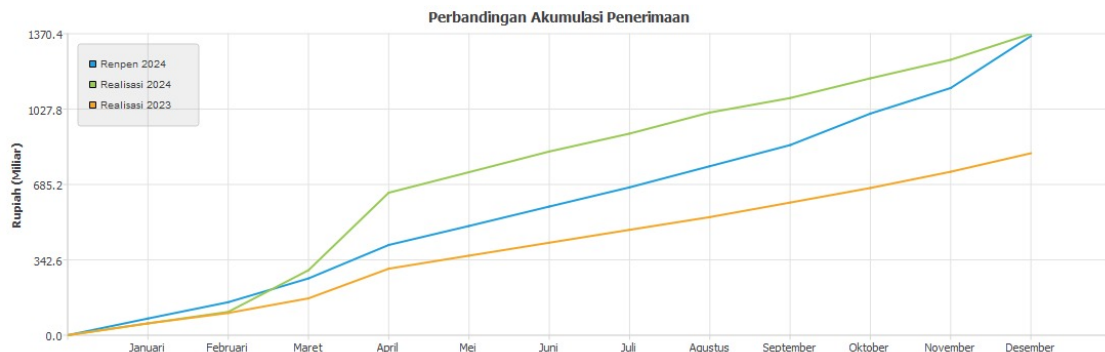
Evaluasi Capaian Kinerja Organisasi

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

a) 1a – CP : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jagakarsa diberi amanah untuk menghimpun penerimaan pajak sebesar **Rp1.359.434.951.000**. Hingga akhir tahun, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil merealisasikan penerimaan sebesar **Rp1.370.401.885.945**, yang berarti capaian ini melampaui target dengan persentase realisasi sebesar **100,81%**.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan yang signifikan dalam target maupun realisasi penerimaan pajak. Pada tahun 2023, target penerimaan sebesar **Rp797.646.243.000**, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai adalah **Rp826.996.254.800** atau sekitar **103,68%** dari target. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024, target penerimaan mengalami kenaikan sebesar **70,50%** dibandingkan tahun sebelumnya, dan realisasi penerimaan menunjukkan peningkatan nominal sebesar **Rp543.405.631.145**.



Capaian ini mencerminkan beberapa hal penting, yaitu:

1. **Kinerja Optimal:** KPP Pratama Jakarta Jagakarsa telah menunjukkan komitmen dan profesionalisme yang tinggi dalam mengelola penerimaan pajak, sehingga target penerimaan tidak hanya tercapai tetapi terlampaui.
2. **Partisipasi Wajib Pajak:** Tingginya tingkat realisasi juga merupakan hasil dari kontribusi aktif dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. **Upaya Berkelanjutan:** Keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai inisiatif peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, seperti edukasi perpajakan, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum.

Ke depan, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan ini. Langkah-langkah strategis seperti penguatan pengawasan kepatuhan, inovasi layanan perpajakan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak akan terus diupayakan guna mendukung pencapaian target yang lebih tinggi di masa mendatang. Keberhasilan tahun 2024 menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat mewujudkan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara.

b) 1b – CP : Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jagakarsa mencatat pertumbuhan positif dalam penerimaan pajak bruto hingga akhir tahun 2024 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh pemulihan kegiatan ekonomi para Wajib Pajak (WP), yang berimbas pada meningkatnya kemampuan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Kondisi tersebut menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang signifikan dan berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak.

Pada tahun 2024, penghitungan capaian kinerja pertumbuhan penerimaan pajak bruto dilakukan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{array}{c} (50\% \times \text{Indeks Capaian Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto}) \\ + \\ (50\% \times \text{Indeks Capaian Realisasi Deviasi Perencanaan Kas}) \end{array}$$

Berdasarkan formula tersebut, rincian hasil penghitungan adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Capaian Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto** dihitung dari kombinasi bobot pertumbuhan unit kerja dan pertumbuhan nasional, yaitu:
 - Pertumbuhan unit kerja: 165,33% (bobot 40%)
 - Pertumbuhan nasional: 157,43% (bobot 60%)Dengan demikian, indeks capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto mencapai **120%**.
2. **Indeks Capaian Realisasi Deviasi Perencanaan Kas** mencapai **100%** dari nilai maksimal yang ditetapkan, yaitu 120%.

Melalui perhitungan ini, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil merealisasikan capaian kinerja sebesar **110%** dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Pencapaian

ini menunjukkan performa yang sangat baik, menjadikan KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berada di peringkat teratas dalam lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan dalam pengelolaan penerimaan pajak, tetapi juga menegaskan peran penting pemulihan ekonomi dalam mendukung keberlanjutan kinerja fiskal nasional. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen KPP Pratama Jakarta Jagakarsa dalam melaksanakan tugasnya secara optimal dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.

Ranking KPP

Ranking	KPP	Bruto	Deviasi sd. Tw 4 (Min 0, Maks 120%)	Realisasi
1	068. PRATAMA JAKARTA JAGAKARSA	120.00 %	100.00 %	110.00 %
2	016. PRATAMA JAKARTA CILANDAK	116.77 %	100.00 %	108.39 %
3	095. MADYA JAKARTA SELATAN II	100.52 %	100.00 %	100.26 %
4	012. PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	120.00 %	80.00 %	100.00 %
5	017. PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	120.00 %	80.00 %	100.00 %
6	066. PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN	109.99 %	90.00 %	100.00 %
7	019. PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUA	119.65 %	80.00 %	99.83 %
8	096. MADYA DUA JAKARTA SELATAN II	98.06 %	90.00 %	94.03 %
9	013. PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	109.69 %	70.00 %	89.85 %

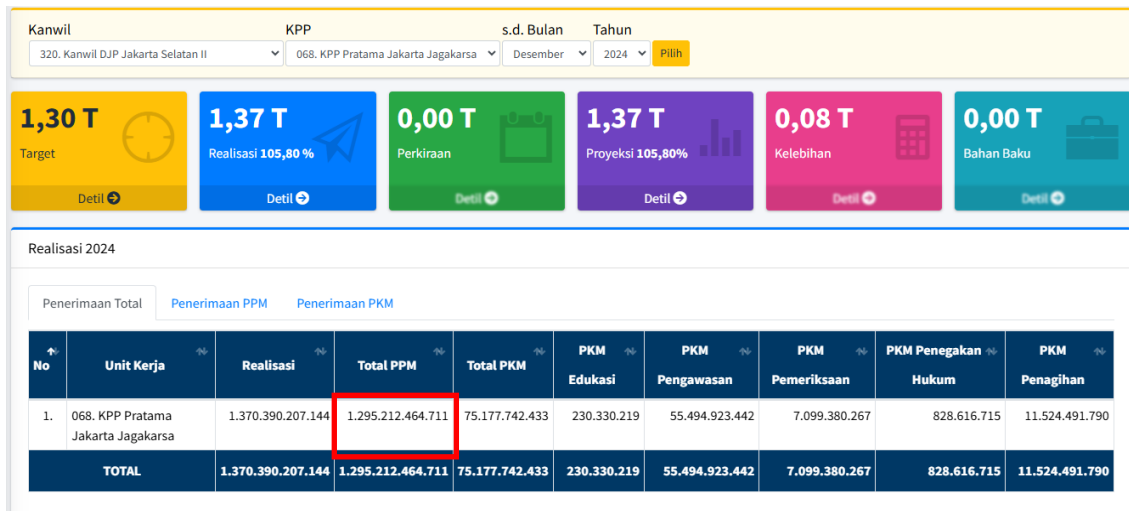
2. Kepatuhan Tahun Berjalan Yang Tinggi

a) 2a – CP : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Definisi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan pelaksanaannya ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM di tingkat KPP ditentukan berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah DJP kepada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Tujuan pengukuran indikator kinerja utama ini adalah untuk memantau penerimaan pajak yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan pembayaran masa, memastikan kepatuhan wajib pajak, dan mendukung optimalisasi penerimaan pajak nasional.

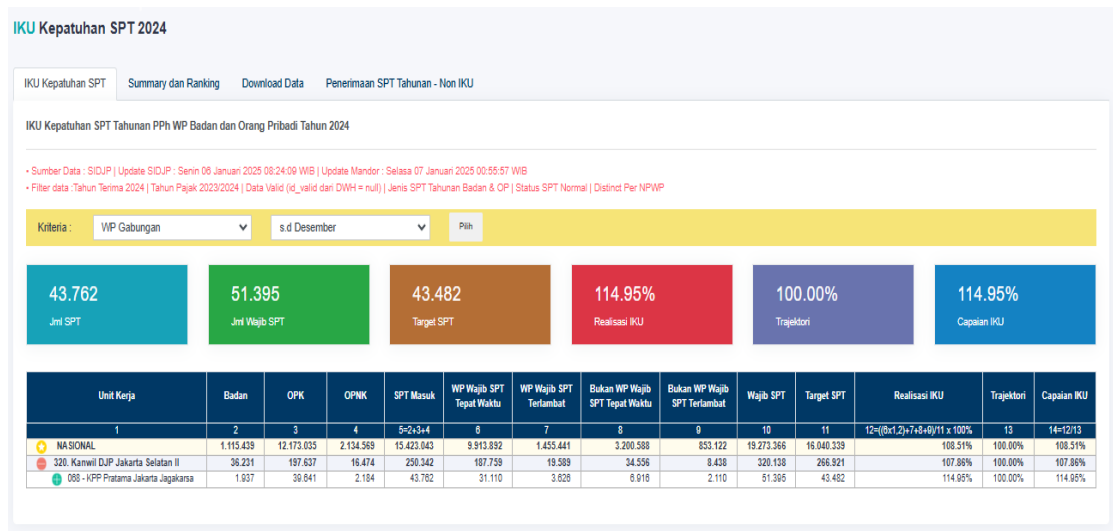
Pada tahun 2024, target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jagakarsa ditetapkan sebesar Rp1.285.062.310.000. Hingga akhir tahun 2024, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan ini mencapai Rp1.295.212.464.711, yang berarti pencapaian sebesar 100,79% dari target yang telah ditetapkan.



Pencapaian yang melampaui target ini mencerminkan keberhasilan strategi pengawasan yang efektif dan sinergi seluruh pihak terkait. Keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang untuk memastikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi penerimaan negara.

b) 2b – CP : Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Dan Orang Pribadi

Pada tahun 2024, sebanyak 51.395 Wajib Pajak telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT, dengan target penyampaian SPT ditetapkan sebanyak 43.482 SPT. Hingga akhir tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil menerima sebanyak 49.984 SPT Tahunan. Dengan demikian, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa telah melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat pencapaian sebesar 114,9%.



Adapun capaian kinerja terkait tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2023 dihitung berdasarkan formula berikut:

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

Melalui capaian ini, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta memastikan target penerimaan SPT Tahunan tercapai dengan optimal. Keberhasilan ini mencerminkan kolaborasi yang efektif antara otoritas pajak dan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Sejak beberapa tahun terakhir, perkembangan situasi, terutama setelah pandemi Covid-19, telah mengubah pola perilaku Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa dalam hal pelaporan SPT. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang sebelumnya melaporkan SPT secara langsung melalui loket TPT, kini beralih melaporkan SPT secara daring melalui laman DJP Online.
2. Layanan konsultasi pengisian SPT yang semula dilakukan secara tatap muka, beralih melalui berbagai saluran daring, termasuk chat atau video call.
3. Permohonan pembuatan EFIN, cetak ulang EFIN, atau permohonan terkait lupa EFIN yang sebelumnya dilayani secara langsung, kini dapat dilakukan melalui

saluran daring, baik melalui surat elektronik maupun menghubungi Kring Pajak di 1500200 untuk layanan lupa EFIN.

Perubahan perilaku Wajib Pajak tersebut semakin mengubah pandangan mereka bahwa pengisian SPT tidak hanya mudah dilakukan, tetapi juga dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Seiring dengan meningkatnya kenyamanan dalam penggunaan layanan daring, hal ini tercermin dalam peningkatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya Yang Tinggi

a) 3a-CP : Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Indikator realisasi penerimaan pajak yang berasal dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) bertujuan untuk menghitung besarnya penerimaan yang dihasilkan dari pengawasan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa diberikan target penerimaan pajak sebesar Rp 74.372.641.000. Realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp 75.177.742.433, yang setara dengan 101,08% dari target yang telah ditetapkan.

Kanwil

320. Kanwil DJP Jakarta Selatan II

KPP

068. KPP Pratama Jakarta Jagakarsa

s.d. Bulan

Desember

Tahun

2024

Pilih

1,30 T

Target

Detil

1,37 T

Realisasi 105,80%

Detil

0,00 T

Perkiraan

Detil

1,37 T

Proyeksi 105,80%

Detil

0,08 T

Kelebihan

Detil

0,00 T

Bahan Baku

Detil

Realisasi 2024

Penerimaan Total

Penerimaan PPM

Penerimaan PKM

No	Unit Kerja	Realisasi	Total PPM	Total PKM	PKM Edukasi	PKM Pengawasan	PKM Pemeriksaan	PKM Penegakan Hukum	PKM Penagihan
1.	068. KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	1.370.390.207.144	1.295.212.464.711	75.177.742.433	230.330.219	55.494.923.442	7.099.380.267	828.616.715	11.524.491.790
TOTAL		1.370.390.207.144	1.295.212.464.711	75.177.742.433	230.330.219	55.494.923.442	7.099.380.267	828.616.715	11.524.491.790

Tercapainya realisasi penerimaan ini tidak terlepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai sistem monitoring kinerja penerimaan, khususnya yang terkait dengan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). Selain itu, kehadiran Dashboard Revenue Management (DRM) yang digunakan untuk memantau kinerja pengawasan dan penegakan hukum di unit Direktorat Jenderal Pajak turut berkontribusi signifikan terhadap pencapaian ini.

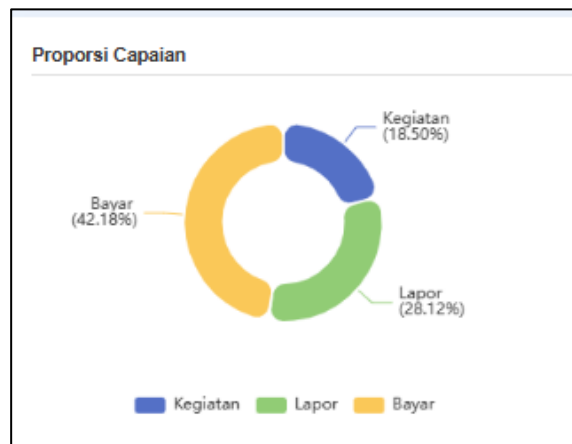
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengawasan pada tahun-tahun mendatang guna mendukung peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan optimasi penerimaan negara.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

a) 4a – CP : Persentase Perubahan Perilaku Lapor Dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi Dan Penyuluhan

Tujuan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan adalah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan efektivitas penyuluhan dan kegiatan humas. Upaya ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pendapatan, memperkuat kepercayaan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil mencapai persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebesar 88,8%, yang melebihi target trajectory yang ditetapkan sebesar 74%. Dengan pencapaian tersebut, capaian IKU yang diperoleh adalah 120%. Adapun proporsi capaian adalah sebagai berikut:



Pencapaian ini tidak terlepas dari peran aktif tim Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Fungsional Penyuluh Pajak yang memiliki kompetensi tinggi, serta kesadaran yang semakin meningkat di kalangan Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa. Komitmen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa untuk terus mendorong kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, baik dalam hal pelaporan maupun pembayaran pajak.

b) 4b-N : Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian sasaran strategis di bidang edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif diukur melalui survei terhadap Wajib Pajak dan pemangku kepentingan lainnya. Survei ini dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP, dengan hasilnya dirangkum dalam Laporan Hasil Survei. Pada Triwulan I hingga Triwulan III, survei yang dilakukan oleh unit kerja vertikal meliputi Survei Kepuasan Pelayanan, yang mengukur tingkat kepuasan stakeholders terhadap pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP):

1. Survei Efektivitas Penyuluhan yang menilai efektivitas pemberian informasi perpajakan oleh KPP, serta
2. Survei Efektivitas Kehumasan yang mengevaluasi kegiatan kehumasan di tingkat Kantor Wilayah DJP.

Kuesioner untuk survei ini disusun oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Pada Triwulan IV, survei dilakukan secara nasional oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak eksternal. Survei ini bertujuan mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan DJP, efektivitas penyuluhan perpajakan, serta efektivitas kehumasan perpajakan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dihitung berdasarkan proporsi survei triwulanan sebesar 15% dan survei nasional tahunan sebesar 85%. Nilai realisasi IKU mencerminkan tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan yang telah diraih.

LAMPIRAN
Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Nomor: [/@NomorND]
Tanggal: [/@TanggalND]

Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan dan Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Kanwil DJP Jakarta Selatan II Tahun 2024

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y- 2024 Kanwil
	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II	89,36	84,06	83,55		85,96			89,10	107,10
87	KPP PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU	92,29	86,79		89,54		92,82	110,82		
88	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU	92,22	86,95		89,58		92,86	110,86		
89	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA	89,63	88,88		89,26		92,62	110,52		
90	KPP PRATAMA JAKARTA PESANGGRAHAN	88,46	88,22		88,34		91,57	109,57		
91	KPP Madya Jakarta Selatan II	85,71	83,19		84,45		87,54	105,54		
92	KPP PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU DUJA	93,29	85,68		89,44		92,71	110,71		
93	KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK	86,53	81,52		85,53		88,66	106,66		
94	KPP Madya DUA Jakarta Selatan II	86,24	82,03		84,13		87,21	105,21		
95	KPP PRATAMA JAKARTA JAGAKARSA	91,03	82,53		86,78		89,96	107,96		

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa mencatat pencapaian yang signifikan dengan nilai Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 91,03, Indeks Efektivitas Penyuluhan sebesar 82,53, dan realisasi IKU sebesar 89,96 atau setara dengan 107,96% dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa dalam memberikan

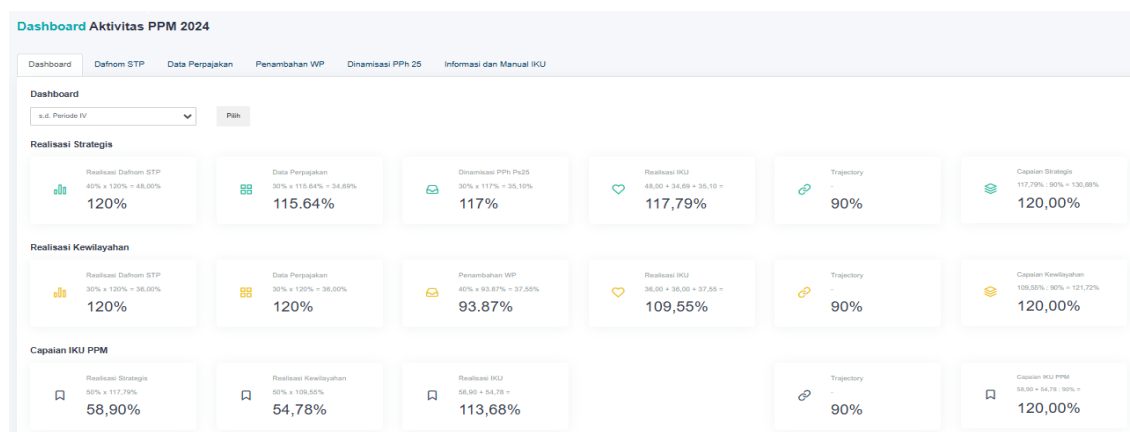
pelayanan dan penyuluhan terbaik kepada Wajib Pajak. Di masa mendatang, pencapaian ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai wujud komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan reputasi DJP di mata para pemangku kepentingan.

5. Pengawasan Pembayaran Masa Yang Efektif

a) 5a-CP : Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

Formula yang digunakan untuk menghitung Persentase Pengawasan Pembayaran Masa yang terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan). Persentase pengawasan pembayaran masa dihitung dengan membagi bobot yang sama, yaitu masing-masing 50%, untuk pengawasan terhadap Wajib Pajak Strategis dan Wajib Pajak Lainnya.

Pada Wajib Pajak Strategis, perhitungan persentasenya didasarkan pada tiga komponen utama: proporsi tindak lanjut daftar nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti dengan bobot 40%, penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 dengan bobot 30%, dan tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan dengan bobot 30%. Sementara itu, untuk Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan), perhitungan melibatkan pencapaian kuantitas penambahan wajib pajak dengan bobot 75%, pencapaian kualitas penambahan wajib pajak dengan bobot 25%, serta tindak lanjut data perpajakan tahun berjalan dengan bobot 30%. Proporsi tindak lanjut daftar nominatif STP yang ditindaklanjuti juga dihitung dengan bobot sebesar 30%.



Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) bertujuan untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak mereka secara tepat waktu. Untuk tahun 2024, target

capaian Indikator Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) telah ditetapkan sebesar 90%.

Hingga akhir tahun 2023, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa mencatat realisasi capaian sebesar 113,68% dari target. Dengan pencapaian ini, nilai IKU mencapai 120%, dan menunjukkan efektivitas program pengawasan yang telah dilaksanakan.

Ke depan, diharapkan capaian ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan melalui implementasi strategi yang lebih inovatif dan efektif. Upaya pengawasan dan sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, sehingga kontribusi penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional dapat terus dioptimalkan.

6. Pengawasan Kepatuhan Material Yang Efektif

- a) 6a-CP : Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat optimalisasi pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. IKU ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dilakukan secara efektif dan efisien.

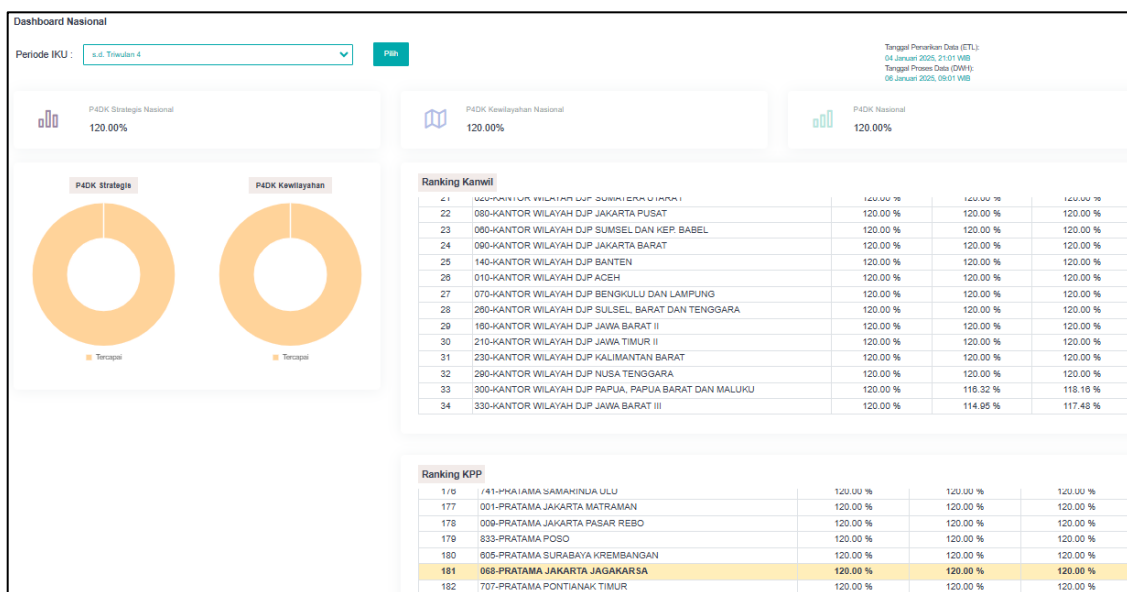
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Permintaan ini dikategorikan menjadi dua jenis utama:

1. **Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Strategis** (bobot 50%), dan
2. **Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)** (bobot 50%).

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dihitung berdasarkan komponen-komponen berikut:

- **Untuk Wajib Pajak Strategis:**
 - A. Komponen Penelitian (40%)
 - B. Komponen Tindak Lanjut (60%)
- **Untuk Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan):**
 - A. Komponen Kuantitas (40%)
 - B. Komponen Kualitas (60%)

Hingga akhir tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil mencapai **120% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%**, sebagaimana terlampir:



KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai. Dengan semangat inovasi dan penguatan pengawasan, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa akan terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak guna mendukung optimalisasi penerimaan negara.

b) 6b – N : Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan pemanfaatan data Matching yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP dan tindak lanjut temuan BPK atas data STP. Sasaran Strategis dari IKU

ini adalah sebagai Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Pada tahun 2024, realisasi pencapaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa untuk indikator ini mencapai 119,14%. Pencapaian tersebut terdiri dari pemanfaatan data STP sebesar 120% dan pemanfaatan data Matching sebesar 118,28%. Angka ini menunjukkan efektivitas kerja dalam mengoptimalkan penggunaan data untuk mendukung pengawasan kepatuhan wajib pajak dan tindak lanjut terhadap temuan BPK.

Ke depannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja. Upaya ini dilakukan dengan memaksimalkan teknologi informasi yang terintegrasi, memastikan kualitas data yang lebih baik, dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, sehingga pengawasan dan pelayanan kepada wajib pajak dapat berjalan lebih optimal.

c) 6c – N : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan kegiatan strategis yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan berjalan optimal dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Indikator Kinerja Utama (IKU) *Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu* digunakan untuk memantau dan mengevaluasi penerimaan pajak dari hasil kegiatan pengawasan terhadap kepatuhan material.

Efektivitas ini dihitung berdasarkan tiga komponen utama:

- **Komponen 1 (30%):** Ketepatan waktu dalam penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak.
- **Komponen 2 (40%):** Kualitas pelaksanaan kegiatan komite kepatuhan.
- **Komponen 3 (30%):** Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Komponen 1: Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas.**

Dari target 400 poin, KPP berhasil merealisasikan 480 poin, menghasilkan capaian sebesar **120%**.

2. **Komponen 2: Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan.**

Capaian rata-rata dari berbagai bidang sebagai berikut:

- Pengawasan: **81,34%**
- Pemeriksaan: **82,89%**
- Penagihan: **90,09%**

Dengan demikian, nilai rata-rata realisasi mencapai **84,77%**, atau **105,97%** dari target 80%.

3. **Komponen 3: Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan**

Dari target **55%**, KPP berhasil mencapai **68,23%**, memberikan pencapaian maksimal sebesar **120%**.

Berdasarkan pembobotan ketiga komponen tersebut, nilai realisasi IKU *Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu* untuk tahun 2024 mencapai **114,39%**, menunjukkan pencapaian yang melampaui target.

Ke depan, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan komite kepatuhan melalui optimalisasi teknologi dalam pengawasan, peningkatan ketepatan waktu dan akurasi pelaporan, penguatan kolaborasi antarbidang, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Dengan langkah strategis ini, diharapkan kinerja semakin optimal dalam mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan mendukung pencapaian target penerimaan pajak secara berkelanjutan.

7. **Penegakan hukum yang efektif**

a) 7a – CP : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian

Sasaran strategis dari IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian ini adalah serangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Adapun tujuan dari IKU ini adalah meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan dan penilaian.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter utama:

- A. Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan
- B. Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

A. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan lima variabel yaitu:

Variabel	Target	Bobot
Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	75%	15%
Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	100%	25%
Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan	100%	30%
Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu	75%	25%
Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi	70%	5%

B. Tingkat Efektivitas Penilaian

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian secara keseluruhan dan ketepatan waktu penyelesaian.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan dua variabel berikut:

- a) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Sampai pada akhir tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil mencapai realisasi maksimal untuk IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian sebesar 120%. Pencapaian ini berasal dari 60% pencapaian IKU Efektivitas Pemeriksaan dan 40% pencapaian IKU Efektivitas Penilaian. Pencapaian ini merupakan peningkatan dimana pada tahun sebelumnya, 2023, realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan adalah sebesar 91,27%. KPP Pratama Jakarta Jagakarsa akan terus memperbaiki sistem kerja pemeriksaan dan penilaian agar mencapai hasil kinerja yang maksimal yang nantinya dapat mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di wilayah kerjanya serta membantu pencapaian target penerimaan pajak yang diemban.

b) 7b – CP : Tingkat Efektivitas Penagihan

Indikator Efektivitas Penagihan bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kepatuhan wajib pajak guna menunjang serta mengamankan pendapatan negara secara optimal. Hal ini dilakukan melalui peningkatan efektivitas tindakan penagihan sebagai bagian dari strategi penerimaan pajak.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat efektivitas penagihan dirancang untuk mengukur keberhasilan tindakan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam upaya mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan ditentukan berdasarkan tiga variabel utama, yaitu:

1. **Variabel Tindakan Penagihan (50%)**

Mengukur tindakan penagihan yang meliputi:

- Penerbitan Surat Teguran
- Pemberitahuan Surat Paksa
- Pemblokiran
- Penyitaan
- Penjualan Barang Sitaan

Ruang lingkup tindakan ini mencakup seluruh kohir yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) dan wajib ditindaklanjuti.

2. **Variabel Tindak Lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%)**

Tindak lanjut DSPC adalah pelaksanaan penagihan atas kohir Wajib Pajak yang masuk dalam daftar sasaran prioritas tahun 2024. Target tindak lanjut ini adalah menyelesaikan tindakan penagihan terhadap 50% dari total Wajib Pajak dalam DSPC pada setiap akhir triwulan.

3. **Variabel Pencairan DSPC (30%)**

Mengukur jumlah penerimaan pajak (dalam rupiah) yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak yang terdaftar dalam DSPC. Realisasi pencairan ini mengacu pada penerimaan dari tindakan penagihan selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa menetapkan target IKU tingkat efektivitas penagihan sebesar **75% untuk Triwulan IV**. Berdasarkan data, realisasi hingga akhir tahun 2024 mencapai **104,29%**, melebihi target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah rincian realisasi berdasarkan masing-masing variabel:

Variabel IKU	Realisasi	% Bobot IKU	Realisasi IKU
Variabel tindakan penagihan	120,00%	50%	60,00%
Variabel tindak lanjut DSPC	70,00%	20%	14,00%
Variabel pencairan DSPC	100,96%	30%	30,29%
Total			104,29%
Indeks Capaian IKU = (104,29%/75%) x 100%			120%*

**Max 120%*

Secara keseluruhan, tindakan penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan pencapaian maksimal sebesar **120%**.

Meski demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa tetap berkomitmen untuk melakukan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan kinerja penagihan di tahun-tahun mendatang. Evaluasi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta mengamankan penerimaan negara secara berkelanjutan.

c) 7c – N : Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Wilayah.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (PBP) diakui ketika usul tersebut disetujui untuk penerbitan SPPBP, yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelaahan Usulan. Setiap usulan dihitung per Wajib Pajak, meskipun untuk tahun pajak berbeda tetap dihitung sebagai satu usulan. Usulan yang disampaikan hingga November tahun berjalan diperhitungkan sebagai realisasi tahun tersebut, sementara usulan pada Desember masuk ke tahun berikutnya.

Target penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan (PBP) ditetapkan sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti, di mana sumber usulan dapat berasal dari fungsi Pengawasan atau Pemeriksaan. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil menyampaikan 2 (dua) usulan PBP, mencatatkan capaian sebesar 200% dari target yang telah ditetapkan.

DAFTAR USUL BUPER YANG DISETUJUI KANWIL							
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II							
TRIWULAN IV 2024							
Nama Wajib Pajak (b)	Dasar Usul (Pemeriksaan/ Pengawasan) (d)	No ND penyampaian usul (e)	Tanggal usul (f)	No BA Penelaahan (g)	Tanggal BA Penelaahan (h)	Unit kerja (contoh kpp A) (i)	Catatan (j)
PT TA	Pengawasan	ND-406/KPP.3009/2024	20 Juni 2024	BA-6/USULBP/WPJ.304/2024	Jumat, 27 Juni 2024	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	Diterima
PT ABK	Pemeriksaan	ND-235/KPP.3009/2024	21 Maret 2024	BA-25/WPJ.30/BD.04/2024	Senin, 18 Maret 2024	KPP Pratama Jakarta Jagakarsa	Diterima

Pencapaian ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung penegakan hukum di bidang perpajakan melalui pengawasan yang efektif dan penyampaian usulan berkualitas. Ke depannya, kontribusi usulan PBP diharapkan dapat terus ditingkatkan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, guna memperkuat upaya penegakan hukum serta menciptakan efek jera bagi pelanggaran perpajakan. Dengan demikian, pencapaian ini tidak hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga membangun kesadaran kepatuhan pajak yang lebih baik di masyarakat.

8. Data Dan Informasi Yang Berkualitas

a) 8a – CP : Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

Tujuan utama dari penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah untuk menghasilkan data potensi pajak yang akurat dan lengkap, sekaligus meningkatkan efektivitas peranan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mendukung kegiatan intelijen perpajakan. Dengan data yang andal, KPP dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis fakta dan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dihitung sebagai rata-rata dari:

1. **Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan**, yaitu tingkat penyelesaian laporan kegiatan pengamatan sesuai target yang ditetapkan.
2. **Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan**, yaitu realisasi jumlah data potensi perpajakan yang berhasil disediakan dibandingkan target yang ditentukan.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil melampaui target yang ditetapkan. Rincian capaian kinerja adalah sebagai berikut:

- **Laporan Kegiatan Pengamatan:** Dari target sebanyak 4 (empat) laporan, berhasil diselesaikan 5 (lima) laporan, setara dengan 125% dari target.

- **Kegiatan Penyediaan Data Potensi Perpajakan:** Dari target sebanyak 820 kegiatan, berhasil direalisasikan sebanyak 1.026 kegiatan, atau mencapai 125,12% dari target.

Secara keseluruhan, realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan tercatat sebesar 120%, menunjukkan performa yang sangat memuaskan.

Capaian ini menjadi landasan penting untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ke depan, diharapkan data potensi pajak yang dihasilkan semakin berkualitas, relevan, valid, serta mencerminkan kondisi yang faktual. Hal ini bertujuan agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber informasi yang tepercaya dalam mendukung Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP).

9. Pengelolaan Organisasi Dan SDM Yang Adaptif

1. 9a – N : Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Sasaran Strategis dari Indikator Kinerja Utama ini adalah sebagai upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memantau dan menghitung persentase jumlah pegawai di lingkungan DJP yang telah memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan jabatannya. Selain itu, IKU ini dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pegawai melalui peningkatan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga dapat mendorong produktivitas pegawai dalam mendukung pencapaian tujuan utama organisasi DJP, yaitu menghimpun penerimaan pajak. IKU ini juga bertujuan untuk mengukur implementasi kebintalan di tingkat unit administrator, guna memastikan produktivitas dan efektivitas organisasi melalui pembentukan pegawai yang memiliki jiwa nasionalisme, integritas tinggi, kompetensi unggul, serta kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Target IKU ini yang ditetapkan untuk KPP Pratama Jakarta Jagakarsa pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

IKU ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Tingkat Kualitas Kompetensi SDM dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM, di mana masing-masing komponen memiliki bobot penilaian sebesar 50%.

Komponen 1: Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

Komponen ini mengukur kualitas kompetensi SDM melalui tiga aspek utama:

1. **Kualitas Kompetensi Pejabat:** Diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural, termasuk pengembangan kompetensinya.
2. **Kualitas Kompetensi Pelaksana dan Fungsional:** Diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pegawai pelaksana dan fungsional, serta pengembangannya.
3. **Pengembangan Kompetensi Pegawai:** Diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai sesuai yang telah ditetapkan.

Komponen 2: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Komponen ini berfokus pada implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui berbagai program dan kegiatan kebintalan. Tujuannya adalah memastikan pegawai menerapkan sikap, perilaku, dan kebiasaan yang mencerminkan empat bidang kebintalan, yaitu ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan. Hal ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KMK No. 467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan demikian, diharapkan terbentuk pegawai yang memiliki jiwa nasionalisme, integritas, kompetensi unggul, serta kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil mencapai nilai IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM sebesar 116,91 dari nilai maksimal 120.

KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berkomitmen untuk terus meningkatkan pencapaian di masa mendatang. Hal ini dilakukan dengan mengintensifkan implementasi organisasi pembelajar sehingga para pegawai dapat memberikan hasil terbaik dalam segala hal yang dilakukan. Selain itu, program kebintalan akan terus diintensifkan di unit kerja guna memastikan tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh.

2. 9b – N : Indeks Penilaian Integritas Unit

Indikator Kinerja Utama indeks penilaian integritas unit bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal) dan menjadikan *Pilot Project* perwujudan *Good Governance* pada unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*).

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi melalui tingkat capaian indeks yang diperoleh dari empat komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu:

1. **Pelayanan perpajakan**
2. **Pengawasan kepatuhan**
3. **Pemeriksaan pajak**
4. **Penagihan pajak**

Survei dilakukan secara proporsional kepada Wajib Pajak yang menerima layanan di masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) oleh Unit Kerja. Pelaksanaan survei didukung perangkat yang disediakan oleh Direktorat KITSDA, dengan panduan teknis yang diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Hingga akhir tahun 2024, berdasarkan hasil survei, capaian **Indeks Penilaian Integritas Organisasi** di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa menunjukkan realisasi sebesar **95,80%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **85%**. Dengan demikian, tingkat pencapaian IKU mencapai **112,70%**.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, hasil ini menunjukkan keberhasilan unit kerja dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang menjadi prinsip Kementerian Keuangan.

3. 9c – N : Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Tujuan IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko adalah Mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai serta risiko unit kerja di lingkungan DJP. IKU ini meliputi dua komponen, yaitu Implementasi Manajemen Kinerja dan Implementasi Manajemen Risiko pada unit Direktorat Jenderal Pajak.

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Efektivitas dari implementasi manajemen kinerja diukur melalui dua indikator utama:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi secara berkelanjutan. Program ini menargetkan penguatan kesadaran pegawai DJP untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi.

Indeks ini diukur melalui dua kegiatan utama:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan kinerja organisasi dan individu di DJP, yang nantinya menjadi dasar perhitungan IKU.

Aspek pengukuran:

- Pengukuran dilakukan oleh Direktorat KITSDA bersama Sekretariat Direktorat Jenderal.
- Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja, yang digunakan untuk menghitung capaian IKU K-3 (Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja).

B. Implementasi Manajemen Risiko

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

1. Administrasi dan Pelaporan

Penilaian dilakukan atas beberapa indikator, termasuk:

a) **Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukung:**

Harus disampaikan tepat waktu melalui Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas.

- o **Skor:** Tepat waktu (1 poin), terlambat (0,5 poin), tidak menyampaikan (0 poin).

b) **Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan:**

Rapat ini harus terintegrasi dengan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap triwulan.

Bukti dokumentasi berupa risalah DKO/notula/LPKR.

- o **Skor:** 2,5 poin per triwulan (maksimal 10 poin untuk empat triwulan).

c) **Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan:**

Laporan harus disampaikan tepat waktu melalui aplikasi atau Nota Dinas.

- o **Skor:** 1 poin per triwulan (maksimal 4 poin untuk empat triwulan).

2. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan mitigasi risiko dievaluasi hingga triwulan pemantauan berdasarkan persentase mitigasi yang selesai dilakukan.

- **Skor maksimal:** 35 poin, dihitung berdasarkan laporan pemantauan triwulanan sesuai KMK-105/KMK.01/2022.
- Setiap rencana aksi memiliki nilai maksimal sebesar 100%.

Untuk tahun 2024, sebagai IKU yang baru ada di tahun 2024 ini, target yang ditetapkan bagi KPP Pratama Jakarta Jagakarsa untuk indeks implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko adalah 90, sedang realisasinya adalah 99,89. Besaran tersebut diperoleh dari realisasi indeks implementasi Manajemen Kinerja sebesar 49,89 dan realisasi indeks implementasi Manajemen Risiko sebesar 50. Dari hasil tersebut maka realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Dan Manajemen Risiko pada KPP Pratama Jakarta Jagakarsa untuk tahun 2024 adalah 110,99.

KPP Pratama Jakarta Jagakarsa berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun, sejalan dengan upaya kami dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kedua komponen dalam IKU ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur penting untuk memantau kinerja, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko yang berpotensi menghambat

tercapainya sasaran organisasi. Dengan langkah ini, kami berharap dapat menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses yang dijalankan.

10. Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel

a) 10a - CP : Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk mengukur kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh. Ruang lingkup perhitungan IKU ini diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023.

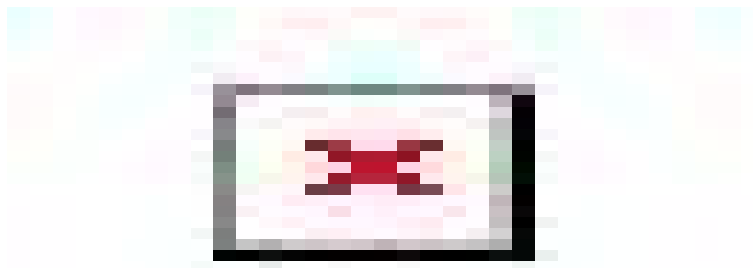
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran dihitung berdasarkan:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran, dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Untuk Triwulan IV, formula perhitungan IKU adalah sebagai berikut:

$$IKU = (50\% \times SMART) + (50\% \times IKPA)$$

Target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ditetapkan pada indeks 91,0 (setara dengan indeks 100).



Hingga akhir tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil memperoleh capaian sebagai berikut:

- Nilai Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA): **96,97**,
- Nilai SMART: **100**.

Berdasarkan hasil tersebut, Nilai Kinerja Anggaran yang diperoleh adalah **98,48**. Dengan merujuk pada tabel indeks yang berlaku, capaian IKU KPP Pratama Jakarta Jagakarsa mencapai **120**.

Pencapaian IKU sebesar 120 mencerminkan komitmen KPP Pratama Jakarta Jagakarsa dalam mengelola anggaran secara optimal. Hal ini dicapai melalui

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berkala atas penggunaan anggaran. Pendekatan ini memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga seluruh pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2024. Penyusunan laporan ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data yang terukur, fakta yang relevan, dan hasil analisis mendalam terhadap kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa sepanjang tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah terlaksana secara optimal. Seluruh kegiatan yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku tetapi juga telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan secara konsisten.

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa berhasil melampaui target penerimaan dengan capaian sebesar 110,98%. Pencapaian ini merupakan prestasi yang membanggakan, terlebih karena target penerimaan telah berhasil melampaui 100% selama empat tahun berturut-turut. Keberhasilan ini tidak lepas dari dedikasi seluruh pegawai serta dukungan aktif dari para stakeholder. Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder, terutama para Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak yang berhasil dikumpulkan menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan dan keberlanjutan negara kita tercinta.

Kami menyadari bahwa meskipun telah banyak pencapaian positif, terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya pada indikator kinerja yang belum mencapai target. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembenahan secara berkesinambungan. Peningkatan kualitas pelayanan akan menjadi prioritas utama kami di tahun-tahun mendatang. Upaya ini tentunya memerlukan dukungan yang terus menerus dari seluruh pihak.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada para stakeholder terkait pencapaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa sepanjang tahun 2024. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi publik yang andal, sehingga mampu

meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari seluruh stakeholder. Dengan demikian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jagakarsa dapat terus berkontribusi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang telah diberikan.

Pajak kuat, Indonesia Maju!